

Perencanaan Partisipatif dalam Pembangunan Hutan Rakyat di Kabupaten Jombang

Dwi Harjo Widiawan ^{a *}

^a Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur, UPTP PH Wilayah VI Nganjuk, Wilayah Kerja Kabupaten Jombang, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Article history:

Dikirim tanggal: 22 Mei 2017

Revisi pertama tanggal: 20 Juni 2017

Diterima tanggal: 21 Juni 2017

Tersedia online tanggal: 07 Juli 2017

Keywords: participatory planning, private forests

ABSTRACT

This paper examines participatory planning in forestry development in private forests. Results: Findings showed that participatory planning in forestry development in private forests in Jombang at this stage of deliberations level RT, meeting farmers' groups and programming villages have been carried out in accordance with the planning stages, while the next process is still hampered commitment issues and policies as well as the involvement of farmer. Actors involved include farmers, forestry extension, forestry businesses and community leaders. In conclusion, participatory planning in forestry development in private forests in Jombang carried out with the stage of investigation, the formulation of the problem, identification of carrying capacity, formulation of objectives, set out the steps, and budgeting. Forestry extension is an actor who has a bigger role in the participatory planning in forestry development.

INTISARI

Tulisan ini menelaah tentang perencanaan partisipatif dalam pembangunan kehutanan pada hutan rakyat. Hasil analisis menunjukkan bahwa perencanaan partisipatif dalam pembangunan kehutanan pada hutan rakyat di Kabupaten Jombang pada tahapan musyawarah ditingkat RT, pertemuan kelompok tani dan program desa sudah dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan perencanaan, sedangkan pada proses selanjutnya masih terkendala masalah komitmen dan kebijakan daerah serta keterlibatan kelompok tani. Aktor yang terlibat antara lain petani, penyuluh kehutanan, pelaku usaha kehutanan dan tokoh masyarakat. Kesimpulannya, perencanaan partisipatif dalam pembangunan kehutanan pada hutan rakyat di Kabupaten Jombang dilaksanakan dengan tahapan penyelidikan, perumusan masalah, identifikasi daya dukung, perumusan tujuan, menetapkan langkah-langkah, dan penentuan anggaran. Penyuluh kehutanan merupakan aktor yang memiliki peran lebih besar dalam perencanaan partisipatif dalam pembangunan kehutanan.

2017 FIA UB. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Hutan memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan sebagaimana disampaikan Mardikanto dkk (1996:12). Hutan sebagai sumber alam

berperan sebagai pemasok bahan baku bagi peningkatan produksi, sebagai pelindung sistem penghasil air, sumber penghasil devisa, perluasan lapangan pekerjaan, dan pendapatan pemerintah. Selain itu, dalam bidang

* Corresponding author. Tel.: +62-858-1555-4646; e-mail: dwiharjo@gmail.com

ekologi hutan memegang peran strategis, yakni sebagai penghirup CO₂, penghasil O₂, dan pengatur dan penopang ekosistem serta sebagai paru-paru dunia.

Pada hakekatnya, pembangunan kehutanan adalah pembangunan sumberdaya hutan secara menyeluruh dan berkesinambungan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat masa kini dan masa datang. Dengan kata lain pembangunan kehutanan harus mampu mewujudkan kondisi hutan dan sumber daya alam hayati lainnya yang dapat terjamin keberadaannya secara mantap dan dapat berfungsi secara optimal.

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan adalah salah satu aspek yang harus diperhatikan untuk mencapai keberhasilan pembangunan. Para pakar berasumsi bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan maka akan memberikan *output* yang lebih optimal.

Pembangunan hutan rakyat di Kabupaten Jombang dimulai pada Tahun 1983 melalui program penghijauan. Sasaran program penghijauan adalah lahan kritis, yaitu lahan tandus yang tidak memungkinkan untuk ditanami dengan tanaman pertanian. Tuntutan kebutuhan ekonomi yang semakin tinggi memberikan efek tekanan terhadap hutan yang ada bagi masyarakat sekitar hutan. Pembangunan hutan rakyat diharapkan mampu untuk menjadi penopang ekonomi keluarga bagi masyarakat sekitar hutan. Perencanaan pembangunan hutan rakyat harus dilakukan secara hati-hati agar masyarakat selaku obyek sekaligus subyek pembangunan kehutanan dapat lebih menerima dan peduli terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan.

Permasalahan perencanaan pembangunan kehutanan di Kabupaten Jombang juga dapat dilihat dari minimnya peran masyarakat dalam mengusulkan program kegiatan pembangunan kehutanan. Hampir di setiap pelaksanaan musrenbang, di mana urusan kehutanan masuk dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat, masyarakat jarang sekali mengusulkan kegiatan kehutanan. Kenyataan ini diperkuat dengan hasil penelusuran data yang terkait dengan partisipasi masyarakat dalam mengusulkan rencana pembangunan kehutanan.

Merujuk pada hal diatas, rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana perencanaan partisipatif dalam pembangunan kehutanan pada hutan rakyat di Kabupaten Jombang?. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan aspek-aspek yang berhubungan dengan perencanaan partisipatif pembangunan kehutanan pada hutan rakyat di Kabupaten Jombang.

2. Teori

2.1 Konsep Perencanaan Partisipatif

Perencanaan merupakan aplikasi dari metode ilmiah untuk membuat kebijaksanaan. Pemikiran tersebut dikemukakan oleh Abe (2002), perencanaan adalah susunan (rumusan) sistematis mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan dimasa depan, dengan pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi-potensi, faktor-faktor internal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam mencapai tujuan tertentu.

Perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan rakyat dan dalam prosesnya melibatkan rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung (Abe, 2002:87). Berdasarkan definisi tersebut dapat dikatakan perencanaan partisipatif berpihak pada kepentingan masyarakat dan perlu ada keterlibatan masyarakat. Melibatkan kepentingan rakyat berarti berjuang melewati pra kondisi untuk mentransformasikan kapasitas kesadaran dan keterampilan masyarakat sehingga bisa keluar dari tradisi bisu dan menyembunyikan maksud di bawah permukaan (Abe, 2002:90). Pelibatan masyarakat secara langsung dalam perencanaan mempunyai dampak positif terhadap perencanaan partisipatif.

Perencanaan partisipatif merupakan perencanaan yang disusun dari bawah atau biasa disebut *bottom up planning*. Langkah-langkah perencanaan yang disusun dari bawah dapat dilihat pada gambar 1, yaitu sebagai berikut:



Gambar 1 Langkah-langkah Perencanaan (Sumber: Abe, 2002)

Penjelasan mengenai gambar tersebut adalah sebagai berikut:

- Penyelidikan merupakan proses untuk mengetahui, menggali dan mengumpulkan persoalan-persoalan bersifat lokal yang berkembang dimasyarakat;
- Tahap selanjutnya adalah perumusan masalah. Data dan informasi yang telah dikumpulkan diolah untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap, utuh dan mendalam;
- Daya dukung tidak hanya sekadar diartikan sebagai dana, melainkan keseluruhan aspek yang bisa memungkinkan terselenggaranya aktivitas dalam mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan;

- d) Perumusan Tujuan. Penentuan tujuan menjadi momentum yang sangat penting. Jika suatu rangkaian langkah dimaksudkan untuk kepentingan rakyat, maka mutlak adanya keterlibatan rakyat (dalam arti keterlibatan secara sadar). Tanpa keterlibatan rakyat, maka menjadi sangat mungkin rumusan yang dikeluarkan mengandung pengaruh watak dari luar. Oleh karena itu, harus disadari bahwa kebutuhan dasar masyarakat akan sangat berbeda dengan pihak luar, sebab setiap komunitas memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Setiap usaha penyeragaman akan bermakna pengingkaran atas pluralitas dan sekaligus pengabaian esensi dari kebutuhan rakyat;
- e) Menetapkan langkah-langkah merupakan proses menyusun apa saja yang akan dilakukan. Proses ini merupakan proses membuat rumusan yang lebih utuh mengenai perencanaan dalam sebuah rencana tindak; dan
- f) Perencanaan anggaran di sini bukan berarti dana atau uang, melainkan suatu usaha untuk menyusun alokasi anggaran atau sumber daya yang tersedia. Penyusunan anggaran akan sangat menentukan berhasil atau tidaknya sebuah perencanaan. Kekeliruan dalam menyusun alokasi, akan membuat suatu rencana berhenti di tengah jalan. Anggaran juga bisa bermakna sebagai sarana kontrol.

2.2 Pembangunan Kehutanan

Pembangunan kehutanan sangat terkait dengan pengelolaan lingkungan. Kegiatan pembangunan kehutanan merupakan salah satu peran penting yang harus dimainkan dalam sebuah pembangunan. Meskipun urusan bidang kehutanan merupakan urusan pilihan, namun pembangunan bidang ini mempunyai peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat serta upaya perbaikan lingkungan yang dilakukan dalam bentuk penanaman tanaman kayu-kayuan dan tanaman produktif.

Pembangunan kehutanan juga sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, karena pembangunan kehutanan itu sendiri merupakan bagian dari upaya-upaya perbaikan lingkungan. Penanganan lahan kritis, penghijauan lingkungan, merupakan contoh nyata upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan. Berangkat dari kesadaran tersebut, maka fungsi dan peranan pembangunan kehutanan harus lebih dioptimalkan dalam mendukung capaian keberhasilan pembangunan secara lebih luas.

Salah satu kebijakan pembangunan kehutanan adalah peningkatan daya dukung lahan melalui rehabilitasi lahan serta perbaikan mutu lingkungan hidup (Mardikanto dkk, 1996:27). Rehabilitasi lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi lahan sehingga daya dukung,

produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga (Permenhut Nomor P.37, 2010). Pembangunan kehutanan mempunyai fungsi strategis yakni memberi kontribusi ekonomi dan ekologi (lingkungan). Hasil pembangunan kehutanan akan meningkatkan pendapatan masyarakat disatu sisi, serta memberikan sumbangan yang besar dalam pelestarian lingkungan hidup disisi lain.

2.3 Hutan Rakyat

Hutan rakyat adalah hutan yang dimiliki rakyat dengan luas minimal 0,25 hektar dengan penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan atau jenis lainnya lebih dari 50 persen dan atau pada tanaman tahun pertama dengan tanaman sebanyak 500 tanaman tiap hektar (Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 49/Kpts.II/1997). Menurut Awang, dkk (2002) Hutan Rakyat adalah hutan yang pengelolaannya dilaksanakan oleh organisasi masyarakat baik pada lahan individu, lahan adat, komunal (bersama), maupun lahan-lahan yang dikuasai negara. Menurut Djuwadi (2002), ciri-ciri hutan rakyat adalah:

- a) Luasnya relatif kecil (0,2 — 1,0 hektar) tergantung dan kepemilikannya. Namun bila kepemilikannya satu kelompok, bisa dijadikan hamparan yang luasnya 20 hektar atau lebih;
- b) Menggunakan sistem tebang pilih terubusan atau tebang butuh dan amat sedikit tebang habis apabila dimanfaatkan kayunya;
- c) Menghasilkan kayu juga bunga, buah, daun, kulit, rimpang, aroma, jamu-jamuan, bumbu, rempah-rempahan, hijauan makanan ternak, jamur dan masih banyak lagi;
- d) Permudaannya dilakukan dengan permudaan buatan, vegetatif, maupun alami;
- e) Pola tanam jarang yang monokultur lebih ke campuran dari berbagai jenis pohon dan tanaman pangan dan rumput;
- f) Perubahan dari satu sistem ke sistem yang lain adalah lambat terutama di luar nilai budaya atau kebiasaan masyarakat setempat;
- g) Pengelolaan hutan tergantung dari pemiliknya, umumnya amat jarang yang perluas tertentu menjadi satu kesatuan;
- h) Selain tujuan pemenuhan kebutuhan individu pemiliknya, juga berfungsi sosial secara terbatas sesuai dengan nilai budaya setempat; dan
- i) Hasil dan produk langsung dari hutan tidak selalu bersifat musiman, bisa bulanan, mingguan bahkan harian. Setiap hari ada saja yang bisa dipetik dan dipanen.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Milles, Huberman dan Saldana. Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014) terdapat empat tahapan yang harus dilakukan, yaitu: pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan: verifikasi dengan proses siklus dan interaktif.

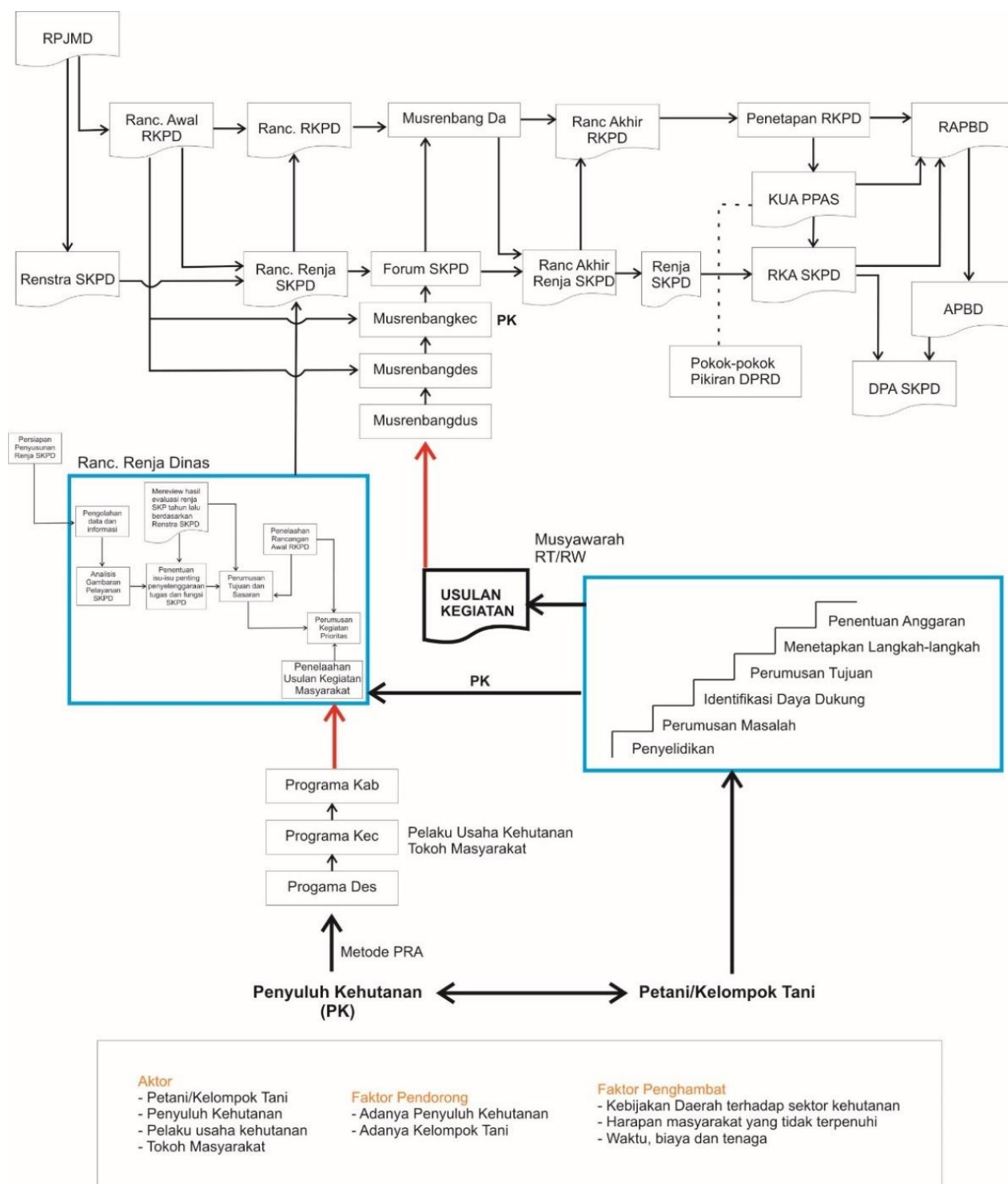
4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kabupaten Jombang adalah salah satu kabupaten yang memiliki luas hutan terbesar di Jawa Timur, yaitu 20.693,6 Ha. Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang Tahun 2016,

kawasan hutan produksi diwilayah administrasi Kabupaten Jombang seluas 18.754,9 Ha; terbagi atas KPH Jombang seluas 14.900,7 Ha dan KPH Mojokerto seluas 3.854,2 Ha, Hutan lindung seluas 873,1 Ha. Sedangkan kawasan konservasi yang berbentuk hutan wisata seluas 11,4 Ha dan Taman Hutan Raya (Tahura) seluas 2.864,70 Ha.

4.1 Perencanaan Partisipatif dalam Pembangunan Kehutanan

Ilustrasi proses perencanaan partisipatif dalam pembangunan kehutanan pada hutan rakyat di Kabupaten Jombang seperti dalam gambar 1, yaitu:



4.1.1 Penyelidikan

Penyelidikan dilakukan untuk mengetahui, menggali dan mengumpulkan informasi dalam sebuah perencanaan partisipatif dalam pembangunan kehutanan sudah dimulai sejak tingkat RT dengan dilaksanakannya musyawarah RT yang melibatkan semua warga termasuk petani yang ada di lingkungan tersebut. Sedangkan untuk perencanaan lewat program penyuluhan kehutanan sudah dimulai sejak masyarakat diajak penyuluh kehutanan untuk menggali, mengumpulkan persoalan di desa mereka secara langsung dengan terjun ke lapangan dengan cara membuat sketsa desa, sketsa kebun, transek, alur sejarah maupun jadwal sehari. Untuk proses pertemuan dengan petani dilakukan secara formal dengan kelompok tani maupun non formal dengan tujuan untuk mengetahui secara langsung persoalan yang bersifat lokal di alami petani. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Alexander Abe (2002:71) yang menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi faktor kunci yang tidak bisa ditawar.

4.1.2 Perumusan Masalah

Pengolahan permasalahan bertujuan untuk mengetahui gambaran yang utuh dan mendalam sehingga rangkaian masalah tersebut dapat diketahui mana yang mendesak dan membutuhkan pemecahan secepatnya. Pelibatan masyarakat dalam tahapan ini penting agar diketahui oleh semua yang hadir dalam musyawarah tersebut dan merupakan kesepakatan bersama. Dalam program perumusan masalah dibuat secara bersama oleh petani dalam sebuah matriks ranking untuk memperoleh tentang pandangan, penilaian, pertimbangan-pertimbangan atau kriteria yang dirasakan penting dan mendesak oleh masyarakat terhadap kegiatan yang dilaksanakannya dalam mengatasi permasalahan didesanya sendiri. Senada dengan pendapat Conyers (1994: 154) bahwa partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya program-program pembangunan akan gagal. Masyarakat akan lebih mempercayai program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk program tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program tersebut. Partisipasi merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat sendiri.

4.1.3 Identifikasi Daya Dukung

Daya dukung yang konkrit dan nyata adalah berupa uang yang bersumber dari pemerintah baik pemerintah daerah kabupaten, provinsi atau pusat. Daya dukung juga dapat berupa tenaga maupun dana masyarakat dan

potensi yang ada di masyarakat yang dapat digunakan untuk pembangunan kehutanan. Hal senada disampaikan oleh Bendavid-val (dalam Kuncoro, 2004:49-50), bahwa sistem informasi perencanaan harus memuat penaksiran sumber-sumber daya pembangunan di luar daerah, tetapi tersedia dan potensial untuk tersedia (dana publik atau swasta yang dapat diinvestasikan pada bidang yang diinginkan oleh pembangunan ekonomi daerah, bakat-bakat khusus atau kapabilitas individual dan lembaga-lembaga yang dapat ditarik dsb).

4.1.4 Perumusan Tujuan

Pada tahapan ini telah melaksanakan prinsip-prinsip agar perencanaan pembangunan kehutanan benar-benar berbasis masyarakat, adapun prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut:

- a) Transparan, bahwa proses dan mekanisme yang dibangun sejak pertama sudah diketahui dan dipantau oleh masyarakat. Proses perencanaan partisipatif dalam pembangunan kehutanan sudah melibatkan masyarakat sejak pertama musyawarah tingkat RT maupun pertemuan kelompok tani dan juga penyusunan program dengan melakukan metode PRA yang melibatkan masyarakat secara aktif dan langsung sehingga prosesnya berlangsung secara terbuka dan transparan;
- b) Responsif, bahwa program pembangunan kehutanan yang dihasilkan lebih disebabkan adanya upaya merespon terhadap apa yang menjadi isu di masyarakat, bukan dari keinginan pribadi dan pihak tertentu. Sejak awal masyarakatlah yang mengusulkan apa yang menjadi masalah mereka yang mereka prioritaskan untuk segera dicarikan jalan keluar sehingga masalah mereka dapat diselesaikan. Untuk menghadapi alih fungsi lahan yang selama ini berkembang, masyarakat ada kekhawatiran untuk terjadi bencana alam sehingga masyarakat mengusulkan untuk melakukan kegiatan penghijauan kembali serta membangun penyelamat tebing agar tidak terjadi longsor;
- c) Partisipatif, keterlibatan masyarakat menjadi satu keniscayaan dalam pengertian perumusan yang terjadi dilakukan bersama dan memperhatikan persoalan-persoalan yang diangkat masyarakat. Perumusan tujuan dengan melibatkan masyarakat dalam musyawarah RT dan dusun serta desa dengan melibatkan petani, tokoh masyarakat serta pelaku usaha kehutanan berlangsung awal tahun sampai dengan proses selesai dengan memperhatikan dan mengangkat isu-isu yang berkembang pada masyarakat; dan
- d) Akuntabel, sepanjang seluruh proses dilakukan secara transparan, menjawab kebutuhan dan melibatkan masyarakat dalam berbagai tahapan, hasilnya pasti dapat dipertanggungjawabkan. Dengan

melibatkan semua stakeholder dalam setiap tahapan perencanaan partisipatif dalam pembangunan kehutanan maka hasilnya pasti dapat dipertanggungjawabkan.

Hal senada juga disampaikan oleh Wicaksono dan Sugiarto (dalam Wijaya, 2001:16), bahwa usaha yang dilakukan masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi agar mencapai kondisi yang diharapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat secara mandiri.

4.1.5 Menetapkan Langkah- langkah

Penetapan langkah-langkah dalam perencanaan pembangunan kehutanan harus dilakukan secara detail yang berkaitan dengan waktu, tenaga, pembagian tugas karena terkait keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan itu nantinya. Pembagian tugas terkait dengan padatnya jadwal petani dalam mengelola tanaman dan lahan mereka, pembagian tugas biasanya didasarkan pada kompetensi yang mereka miliki. Waktu yang menjadi salah satu faktor penting karena dalam pembangunan kehutanan berhasil atau tidaknya sebuah kegiatan kehutanan akan dipengaruhi oleh waktu.

Senada dengan ciri-ciri perencanaan partisipatif Wicaksono dan Sugiarto (dalam Wijaya, 2001:25), perencanaan harus bersifat fisibilitas (realistis), perencanaan harus bersifat spesifik, terukur, dapat dijalankan, dan mempertimbangkan waktu. Hal sama dengan definisi perencanaan dikemukakan oleh Handoko (2003:77-78), perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Kemudian, Tjokroamidjojo (1989:12) menjelaskan arti dan fungsi perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bilamana dan oleh siapa.

4.1.6 Penentuan Anggaran

Penentuan anggaran dalam perencanaan pembangunan kehutanan di Kabupaten Jombang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan anggaran dan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat disusun secara rinci dan sesuai dengan kebutuhan, karena menurut mereka anggaran akan berpengaruh dalam pelaksanaan apa yang mereka rencanakan saat ini. Abe (2002) menjelaskan bahwa penyusunan anggaran ini akan sangat menentukan berhasil atau tidaknya sebuah perencanaan. Kekeliruan dalam menyusun alokasi, akan membuat suatu rencana kandas di tengah jalan. Anggaran juga bisa bermakna sebagai sarana kontrol.

4.2 Aktor-aktor dalam Perencanaan Partisipatif

Aktor-aktor yang terlibat dalam proses perencanaan partisipatif dalam pembangunan kehutanan pada hutan

rakyat di Kabupaten Jombang antara lain: petani yang tergabung dalam kelompok tani, penyuluh kehutanan, pelaku usaha kehutanan, dan tokoh masyarakat.

Petani yang tergabung dalam kelompok tani merupakan aktor yang terlibat dalam perencanaan partisipatif pembangunan kehutanan di kabupaten jombang. Petani berperan aktif dalam proses perencanaan pembangunan kehutanan dengan terlibat langsung dalam proses musyawarah mulai dari awal di musyawarah RT sedangkan keterlibatan kelompok tani sebagai perwakilan dalam menyuarakan aspirasi mereka belum dilibatkan secara langsung untuk mewakili mereka. Keterlibatan aktif petani dalam wadah kelompok tani sangat terasa dalam proses penyusunan program dan rapat kelompok tani untuk mengusulkan rencana kegiatan mereka secara langsung kepada dinas dengan bantuan dari penyuluh kehutanan.

Penyuluh kehutanan yang merupakan petugas teknis dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang yang ditempatkan di wilayah kerja memiliki jumlah yang tidak sebanding dengan luasan wilayah yang mereka kerjakan. Penyuluh kehutanan ikut berperan aktif dalam proses perencanaan pembangunan kehutanan di musrenbang tingkat kecamatan. Dalam pertemuan kelompok penyuluh kehutanan sebagai penggerak dan motivator kepada petani untuk bisa ikut andil dalam proses perencanaan pembangunan kehutanan melalui usulan-usulan kegiatan yang langsung mereka sampaikan ke Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Dalam penyusunan program penyuluhan kehutanan, penyuluh kehutanan berperan sebagai fasilitator masyarakat agar mampu untuk mengenali potensi dan masalah yang ada di wilayah dan mencari jalan keluarnya.

Pelaku usaha kehutanan terlibat dalam proses perencanaan meski hanya sebatas keterlibatan pasif, artinya bahwa peran mereka ikut terlibat apabila ada undangan untuk menghadiri dan memberikan pendapat apabila diminta. Keterlibatan para pelaku usaha kehutanan hanya pada proses penyusunan program tingkat kecamatan yang diadakan oleh penyuluh kehutanan.

Tokoh masyarakat memiliki peran sebagai motivator penggerak masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan kehutanan. Dalam pelaksanaan musrenbang tokoh masyarakat lebih memiliki potensi untuk ikut berpartisipasi aktif dan memiliki kesempatan yang lebih besar dalam mempengaruhi perencanaan. Dalam pertemuan kelompok tani tokoh masyarakat kurang begitu dilibatkan sama halnya dengan penyusunan program penyuluhan, yang pada tingkat kecamatan diundang sebagai peserta. Tokoh masyarakat adalah salah satu potensi dalam pembangunan untuk menggerakkan masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan

pembangunan desa agar terciptanya pembangunan nasional. Tokoh masyarakat yang dimaksud di sini adalah kepala desa dan ketua kelompok tani periode sebelumnya yang menjadi pioner pembangunan kehutanan di desa.

5. Kesimpulan

Perencanaan partisipatif dalam pembangunan kehutanan pada hutan rakyat di Kabupaten Jombang pada tahapan musyawarah ditingkat RT, pertemuan kelompok tani dan program desa sudah dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan perencanaan antara lain:

- a) Penyelidikan, dengan mengetahui, menggali, dan mengumpulkan persoalan yang berkembang dimasyarakat melalui musyawarah RT, pertemuan kelompok tani maupun membuat sketsa desa, sketsa kebun transek, alur sejarah dan jadwal sehari;
- b) Perumusan masalah, dilakukan dengan menganalisis permasalahan sehingga diperoleh gambaran yang lengkap, utuh dan mendalam melalui musyawarah dan matriks rangking;
- c) Identifikasi daya dukung, dilakukan dengan menggali sumber pendanaan dan potensi yang ada di masyarakat;
- d) Perumusan tujuan, dilaksanakan dengan menggunakan prinsip transparan, responsif, partisipatif, dan akuntabel;
- e) Menetapkan langkah-langkah, dilakukan dengan menentukan waktu, tenaga dan pembagian tugas secara detail sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan melalui pertemuan kelompok tani dan musyawarah program; dan
- f) Penentuan Anggaran, disusun secara rinci dan sesuai dengan kebutuhan.

Sedangkan tahapan untuk ke tingkat musrenbang dusun tidak bisa berlanjut akibat tersisih oleh usulan fisik prasarana, program hanya sampai program kabupaten dan itu tidak dimanfaatkan sebagai bahan perencanaan pembangunan kehutanan di tingkat kabupaten dikarenakan tidak adanya komitmen pemerintah daerah untuk menggunakan hasil program kabupaten sebagai salah satu masukan untuk menyusun perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten. Sedangkan partisipasi masyarakat melalui jalur pertemuan kelompok tani yang diusulkan melalui penyuluh kehutanan bisa diterima sampai tingkat dinas. Yang berperan dalam perencanaan partisipatif dalam pembangunan kehutanan pada hutan rakyat antara lain petani/kelompok tani, penyuluh kehutanan, pelaku usaha kehutanan dan tokoh masyarakat sedangkan yang memiliki peran lebih besar dalam perencanaan partisipatif dalam pembangunan kehutanan adalah penyuluh kehutanan, selain sebagai fasilitator juga sebagai motivator menggerakkan petani untuk ikut aktif dalam perencanaan pembangunan kehutanan. Pelaku

usaha kehutanan memiliki peran yang relatif kecil diantara aktor yang lainnya, mereka hanya berpartisipasi secara pasif.

Daftar Pustaka

- Abe, Alexander. (2002). *Perencanaan Daerah partisipatif*. Yogyakarta: Pembaruan.
- Awang, S dkk. (2002). *Hutan Rakyat, Sosial Ekonomi dan Pemasaran*. BPFE, Yogyakarta.
- Conyers, Diana. (1994). *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Djuwadi. (2002). *Pengusahaan Hutan Rakyat. Fakultas Kehutanan*. UGM, Yogyakarta.
- Handoko. (2003). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. BPFE, Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajat. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mardikanto, Totok, Enny Lestari, Adjat Sudradjat, Endang Siti Rahayu, Retno Setyowati, & Supanggyo. (1996). *Penyuluhan Pembangunan Kehutanan*. Pusat Bina Penyuluhan Departemen Kehutanan RI bekerjasama dengan Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret (UNS), Jakarta.
- Miles M. B., Huberman, A. Michael, dan Saldana, Johnny,. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. Edition 3*. California: Sage Publications, Inc.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, (1989). *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Wijaya, Rina. (2001). *Forum Pengambilan Keputusan dalam Proses Perencanaan Pembangunan di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Di Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta)*. Tesis, Magister Perencanaan Kota dan Daerah, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.